

ANALISIS TERHADAP PERANAN DAN STRATEGI BANK INDONESIA SERTA PEMERINTAH DALAM MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA

Dian Indah Sari

Program Studi Sistem Informasi Akuntansi
AMIK BSI Bekasi
dian.dhr@bsi.ac.id

ABSTRACT

Instability of the financial system is very bad impact is the loss of public confidence and declining economic growth and community. Besides the cost of economic recovery particularly the financial sector is very large due to the crisis. While the recovery process also runs less in line with expectations. Therefore, the stability of the financial system must be maintained to ensure the public interest. Research methods used is the method of content analysis by describing and analyzing the existing sources to record these data relate to each other the problem studied. Role of Bank Indonesia in maintaining the stability of the financial system, among others maintain monetary stability, creating a healthy performance of financial institutions, organize and maintain smooth operation of payment systems, research and monitoring and financial system safety net. strategy of Bank Indonesia in maintaining the the stability of the financial system, among others coordination and cooperation, monitoring, crisis prevention and crisis management. There are three reasons for the importance of the stability of the financial system, namely: monetary stability can only be realized with the financial stability, a stable financial system will creating trust and supportive environment for depositors and investors, encourage efficient financial intermediation, encourage the operation of the market and improve the allocation of economic resources. Bank Indonesia and government has implemented its role and strategy in maintaining the stability of the financial system in Indonesia.

Keywords : Role, Strategy, Stability of Financial System

I. PENDAHULUAN

Krisis keuangan yang terjadi diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia pada tahun 1997 semakin menyadarkan akan pentingnya stabilitas sistem keuangan. Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Tingginya tingkat krisis yang dialami Indonesia ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian Indonesia tahun 2014 dinilai akan berada dalam kondisi terpuruk. Kondisi dapat terjadi karena dipengaruhi oleh perekonomian dunia yang cenderung tidak stabil. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) M Riza Damanik menyebutkan, terdapat dua penyebab yang membuat kondisi perekonomian nasional terpuruk. Penyebab itu adalah kenaikan harga minyak dunia yang mendorong subsidi membengkak serta merosotnya nilai tukar rupiah yang melipatgandakan nilai utang luar negeri.

Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya.

Ketidakstabilan sistem keuangan menimbulkan dampak yang sangat buruk yakni hilangnya kepercayaan masyarakat dan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Disamping itu biaya pemulihan ekonomi khususnya sektor keuangan akibat krisis tersebut sangat besar. Sementara proses pemulihannya juga berjalan kurang sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, stabilitas sistem keuangan wajib dipelihara untuk menjamin kepentingan publik.

Dalam beberapa tahun terakhir paska krisis, topik stabilitas keuangan menjadi agenda utama para pembuat kebijakan baik ditingkat nasional maupun internasional, yang ditandai dengan semakin banyaknya publikasi, hasil kajian, seminar dan konvensi yang membahas stabilitas keuangan. Semakin banyak juga bank-bank sentral maupun organisasi keuangan internasional yang secara khusus membentuk divisi/unit khusus untuk memonitor dan menilai kondisi keuangan negara masing-masing dan menerbitkannya dalam suatu laporan stabilitas keuangan. Sementara organisasi internasional juga melakukan hal yang sama untuk

konteks stabilitas skala regional maupun internasional.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peranan

Soekanto (2009:212-213) mengatakan bahwa peranan merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain : Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

2.2. Pengertian Strategi

Hax dan Nicholas (2005:64) mendefinisikan strategi sebagai cara menuntun perusahaan pada sasaran utama pengembangan nilai korporasi, kapabilitas manajerial, tanggung – jawab organisasi, dan sistem administrasi yang menghubungkan pengambilan keputusan strategik dan operasional pada seluruh tingkat hirarki, dan melewati seluruh lini bisnis dan fungsi otoritas perusahaan.

Pearce dan Robinson (2006:83), mendefinisikan strategi sebagai seperangkat keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi dari rencana yang didesain untuk mencapai tujuan.

Siagian (2007:56), mendefinisikan strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

2.3. Pengertian Bank

Pengertian bank berdasarkan UU Negara Republik Indonesia No. 10/1998 pasal 1 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian Bank Menurut Stuart (2007:45) adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan cara memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan menambah uang baru (kertas atau logam).

Abdurrachman (2008:72) mendefinisikan bank sebagai suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain lain.

2.4. Stabilitas Sistem Keuangan

A. Pengertian Stabilitas Sistem Keuangan

Schinasi (2006:35) menyatakan bahwa Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) adalah kondisi dimana sistem keuangan :

1. Secara efisien memfasilitasi alokasi sumber daya dari waktu ke waktu, dari deposan ke investor dan alokasi sumber daya ekonomi secara keseluruhan.
2. Dapat menilai / mengidentifikasi dan mengelola resiko-resiko keuangan.
3. Dapat dengan baik menyerap gejolak yang terjadi pada sektor keuangan dan ekonomi.

SSK adalah sistem keuangan yang stabil yang mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan (*shock*) yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan menurut Bank Indonesia (2007:2).

SSK adalah ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan perekonomian, sehingga fungsi intermediasi, sistem pembayaran dan penyebaran resiko tetap berjalan dengan semestinya menurut Bank Indonesia (2007:2).

B. Kerangka Kerja SSK Bank Indonesia

1. isi BI yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.
 2. tujuan SSK yaitu turut aktif dan menciptakan dan memelihara sistem keuangan yang stabil dan sehat.
 3. strategi SSK
 - a. memantapkan regulasi, standar dan disiplin pasar, meliputi : regulasi dan standar (seperti Basle Core, Principles, CPSIP, IAS, ISA) dan Disiplin Pasar
 - b. peningkatan riset dan surveillance meliputi : sistem deteksi dini dengan Indikator Makro Prudensial dan sistem seteksi sini dengan Indikator Mikro-Prudensial (agregat)
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama, meliputi : koordinasi internal dan koordinasi eksternal
 - d. penetapan jaring pengaman dan krisis manajemen meliputi : *Lender of last resort* (kondisi normal dan krisis sistemik) dan penyelesaian krisis (jaring pengaman)
 4. Sasaran Strategis Bank Indonesia
Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, antara lain :
 - a. Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran
 - b. Menjaga stabilitas nilai tukar
 - c. Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien
 - d. Menjaga SSK yang didukung dengan penguatan *surveillance* SP
 - e. Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis
 - f. Memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar
 - g. Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel
 - h. Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, kultur, dan governance
 - i. Mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten
 - j. Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif BI
 - k. Memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK
 5. Faktor Pendukung Stabilitas Sistem Keuangan
Terlapat empat faktor yang mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan menurut yaitu : lingkungan ekonomi makro yang stabil, lembaga keuangan yang dikelola dengan baik, pengawasan institusi keuangan yang efektif serta sistem pembayaran yang aman dan handal. (Bank Indonesia, 2007:2)
- C. Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan
- Tiga alasan pentingnya stabilitas sistem keuangan menurut Bank Indonesia (2007:3) yaitu :
1. Stabilitas moneter hanya dapat terwujud dengan adanya stabilitas keuangan, karena system keuangan merupakan transmisi kebijakan moneter. Perkembangan berikut berpotensi pada meningkatnya resiko bagi perekonomian suatu Negara
 - a. Perkembangan perekonomian yang sangat signifikan dibanding perkembangan ekonomi.
 - b. Proses financial deepening menyebabkan berubahnya komposisi system keuangan, dimana pangsa monetary assets (agregat) semakin turun sementara pangsa non monetary assets semakin naik, sehingga semakin meningkatkan monetary base.
 - c. Globalisasi dan cross border integration semakin terintegrasinya system keuangan yang tercermin dari berkembangnya konglomerasi.
 2. Sistem keuangan semakin kompleks terutama sistem keuangan, produk dan aktivitas akibat deregulasi dan liberalisasi.
 3. Sistem keuangan yang stabil akan :
 - a. Menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang mendukung bagi nasabah penyimpan dan investor untuk menanamkan dananya pada lembaga keuangan, termasuk menjamin kepentingan masyarakat terutama nasabah kecil.
 - b. Mendorong fungsi intermediasi keuangan yang efisien sehingga pada akhirnya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
 - c. Mendorong beroperasinya pasar dan memperbaiki alokasi sumber daya perekonomian.

2.5. Peranan dan Strategi Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

A. Peranan Bank Indonesia dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki lima peranan utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peranan utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu menurut Bank Indonesia (2007:6) adalah:

1. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi atau sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.
2. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (*law enforcement*) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur

Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

3. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat *real time* atau dikenal dengan nama sistem *RTGS (Real Time Gross Settlement)* yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.
4. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara *macroprudential*, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator *macroprudential* untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.
5. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort (LoLR)*. Fungsi *LoLR* merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai *LoLR* mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi *LoLR* dapat

diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai *LoLR*, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

B. Strategi Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas sistem keuangan dengan strategi monitoring stabilitas sistem keuangan dan solusi bila terjadi krisis. Strategi BI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan mencakup : (Bank Indonesia, 2007:11)

1. Koordinasi dan kerjasama

Upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, selain dilakukan oleh Bank Indonesia juga oleh instansi terkait lainnya. Jadi berbagai instrumen dalam stabilitas sistem keuangan, tidak hanya ditentukan oleh bank sentral, tetapi juga oleh otoritas lainnya. Untuk pengelolaan informasi dan efektivitas kebijakan dalam stabilisasi sistem keuangan, maka perlu adanya koordinasi antara lembaga tersebut. Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas yang terlibat dalam stabilitas sistem keuangan, dapat terhindar dari pertentangan dan dampak negatif. Pengalaman di negara lain menunjukkan bahwa koordinasi sulit terjadi apabila fungsi pengawasan & pengaturan perbankan dipisahkan dari bank sentral. Namun jika pemisahan terpaksa harus dilakukan, maka koordinasi dapat dilakukan melalui pembentukan Forum Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan bank sentral (Bank Indonesia), otoritas pengawas sistem keuangan, dan pemerintah yang didukung oleh kekuatan hukum.

2. Pemantauan

Pemantauan terhadap stabilitas keuangan penting dilakukan untuk mampu mengukur tekanan risiko yang akan timbul, khususnya gangguan yang bersifat sistemik atau dapat menciptakan krisis. Melalui deteksi dini ini, pencegahan terjadinya instabilitas keuangan yang mematikan perekonomian dapat dilakukan melalui kebijakan bank sentral maupun pemerintah. Pemantauan stabilitas keuangan merupakan tugas bank sentral yang merupakan satu kesatuan dalam menjaga stabilitas keuangan. Ada dua indikator utama yang menjadi target pemantauan, yakni

indikator microprudential dan indikator makroekonomi. Kedua indikator tersebut saling melengkapi sebagai aksi dan reaksi dalam sistem keuangan dan ekonomi. Pemantauan indikator microprudential dilakukan terhadap kondisi mikro institusi keuangan dalam sistem keuangan. Melalui pemantauan ini dapat diketahui potensi risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit dan rentabilitas institusi keuangan, yang dimaksudkan untuk mengukur ketahanan sistem keuangan. Pemantauan indikator makroekonomi juga perlu dilakukan terhadap kondisi makroekonomi domestik maupun internasional yang berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, selanjutnya dilakukan analisis guna memprediksi kondisi stabilitas sistem keuangan.

Indikator Pengukuran Stabilitas Sistem Keuangan adalah :

a. Indikator Microprudential (Agregat)

- Kecukupan modal
- Rasio modal agregat
- Kualitas Aset

b. Indikator Makroekonomi

- Pertumbuhan ekonomi
- Tingkat pertumbuhan agregat
- Sektor ekonomi yang jatuh
- BOP
- Defisit neraca berjalan
- Kecukupan cadangan devisa
- Pinjaman luar negeri
- Term of trade
- Komposisi dan jangka waktu aliran modal
- Inflasi
- Volatilitas inflasi
- Suku bunga dan nilai tukar
- Volatilitas suku bunga dan nilai tukar
- Tingkat suku bunga domestic
- Stabilitas nilai tukar yang berkelanjutan
- Jaminan nilai tukar
- Efek menular
- Trade spillover
- Korelasi pasar keuangan
- Faktor-faktor lain
- Investasi dan pemberian pinjaman yang terarah
- Dana pemerintah pada system perbankan
- Hutang jatuh tempo

3. Pencegahan Krisis

Pencegahan krisis dilakukan dengan cara mencegah ketidakstabilan dalam sistem

keuangan. Terdapat berbagai langkah kebijakan untuk mengatasi ketidakstabilan dalam sistem keuangan. Langkah-langkah tersebut diadopsi dari standar / regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga – lembaga internasional, seperti *International Monetary fund (IMF)*, *Bank for International Settlement (BIS)*, maupun asosiasi profesional lainnya.

Standar Utama dalam Menciptakan Sistem Keuangan yang Sehat

- a. Sistem Kebijakan Makroekonomi dan Transparansi Data, meliputi : Transparansi kebijakan moneter dan keuangan, Transparansi fiskal serta Standar penyebaran data
 - b. Infrastruktur Pasar dan Kelembagaan, meliputi : *Corporate governance*, *Systematically important payment system*, Integritas pasar (*Financial Action Task Force / FATF on anti money laundering*), ketidakmampuan membayar, *International Accounting Standard (IAS)* dan *International Standard on Auditing (ISA)*
 - c. Kebijakan dan Pengawasan Keuangan Prudensial, meliputi : Pengawasan bank yang efektif, Regulasi surat-surat berharga dan Pengawasan asuransi
4. Manajemen Krisis
- Meskipun pendekatan untuk mencegah timbulnya krisis cukup banyak, namun tidak ada jaminan bahwa krisis tidak akan terjadi lagi. Karena potensi terjadinya krisis selalu ada, maka perlu adanya pengelolaan krisis. Manajemen krisis ini berisi prosedur penyelesaian krisis dan kejelasan peran serta tanggung jawab dari masing-masing institusi yang terlibat didalamnya. Apabila suatu bank dinyatakan dalam kesulitan misalnya, maka diperlukan langkah-langkah di bawah ini:
- a. Institusi yang berwenang harus menetapkan apakah bank yang dinyatakan dalam kesulitan itu tergolong sistemik atau tidak.
 - b. Proses penyelamatan harus ditetapkan secara hukum mengingat adanya penggunaan dana publik dalam proses penyelamatan tersebut.
 - c. Peran Bank Indonesia, otoritas pengawasan, dan pemerintah harus ditetapkan secara jelas.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *content analysis* yaitu dengan menjelaskan

dan menganalisis dari sumber-sumber yang ada, dengan catatan data-data tersebut saling berhubungan satu sama lain dengan permasalahan yang diteliti

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengalaman Dalam Penyelamatan Sistem Keuangan / Perbankan Nasional di Masa Krisis Krisis keuangan dan perbankan yang terjadi tahun 1997-1998 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga mengenai pentingnya penciptaan suatu kerangka stabilitas sistem keuangan dimana stabilitas sistem keuangan merupakan suatu rangkaian proses dan kegiatan yang diawali dengan pemantauan (*surveillance*) dan identifikasi kemungkinan timbulnya suatu krisis, sampai dengan pencegahan krisis tersebut terjadi.

Aspek pemantauan dan identifikasi krisis merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan karena langkah preventif dan antisipatif dipandang sebagai langkah yang lebih murah daripada penyelesaian krisis (*crisis resolution*).

Menjaga stabilitas keuangan merupakan salah satu fungsi pokok dari Bank sentral modern, yang tidak kalah pentingnya dari memelihara stabilitas moneter. Stabilitas keuangan bergantung pada lima elemen terkait yakni :

1. Lingkungan makro-ekonomi yang stabil;
2. Lembaga finansial yang dikelola baik;
3. Pasar finansial yang efisien;
4. Kerangka pengawasan prudensial yang sehat;
5. Sistem pembayaran yang aman dan handal.

Pengalaman krisis tersebut bagi Bank Indonesia dapat dijadikan suatu pelajaran penting bahwa tugas bank sentral sebagai penjaga stabilitas moneter (otoritas moneter) tidaklah cukup tanpa dukungan stabilitas sistem keuangan yang sehat. Gejolak dalam lembaga keuangan khususnya bank, merupakan salah satu sumber instabilitas. Oleh karena itu, krisis perbankan harus dicegah atau ditangani untuk menghindarkan gangguan terhadap sistem pembayaran dan arus kredit dalam perekonomian.

Terkait dengan hal tersebut, upaya membangun sistem keuangan yang stabil memerlukan perangkat aturan hukum (*legal framework*) yang mampu menjadi landasan bagi penyelenggaraan fungsi bank sentral secara utuh. Sebagaimana telah dipahami bahwa dalam *Legal framework* sistem keuangan dan perbankan nasional yang berlaku pada masa terjadinya krisis, bank sentral yang pada waktu itu merupakan bagian dari otoritas perbankan tidak dilengkapi dengan perangkat hukum yang memadai ketika harus mengambil tindakan darurat guna mengatasi

systemic risk di sektor perbankan yang hampir-hampir saja melumpuhkan sistem perbankan nasional.

Upaya mengatasi krisis perbankan pada masa itu dianggap perlu menggunakan dua pendekatan yaitu :

1. Perlunya mem-back-up sistem perbankan nasional agar tidak collaps
2. Membantu penyelesaian krisis keuangan yang dihadapi sektor korporasi untuk memulihkan sektor perbankan dan perekonomian nasional.

Terkait dengan penyelesaian krisis masa lalu, terdapat dua hal yang perlu dirumuskan sebagai politik hukum atas upaya yang telah diambil Bank Indonesia dan Pemerintah dalam penyelamatan sistem perbankan nasional di masa krisis yang akan terjadi, antara lain :

1. Politik hukum berkenaan dengan perlunya penyusunan perangkat aturan yang ditujukan untuk menanggulangi krisis atau *systemic risk* yang norma hukumnya dirumuskan secara berbeda dari perangkat aturan yang mengatur kegiatan usaha bank dalam keadaan normal. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sampai dengan saat ini Indonesia belum memiliki perangkat aturan yang ditujukan untuk menanggulangi krisis atau *systematic risk* yang normanya berbeda dari perangkat aturan yang mengatur kegiatan usaha bank dalam keadaan normal. Perangkat hukum di bidang keuangan dan perbankan yang ada hanya dapat digunakan sebagai aturan dalam keadaan normal saja. Agar tindakan yang diambil oleh otoritas yang berwenang dalam mengatasi krisis dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka selain perangkat hukum yang mengatur kondisi normal perlu disusun pula perangkat hukum yang melandasi kerangka kerja (*framework*) manajemen krisis yang bersifat strategis (*crisis strategy management*).
2. Politik hukum terhadap fungsi *Lender Of Last Resort (LOLR)* oleh Bank Indonesia dengan ditempuhnya kebijakan pemberian BLBI sebagai upaya penyelamatan sistem perbankan dan perekonomian nasional.

Strategi Bank Indonesia dalam mengatasi Krisis Keuangan dan Perbankan Nasional saat ini antara lain :

1. Bank Indonesia memfungsikan peranannya selaku "*lender of resort* " dengan memberikan *Liquidity support* dengan nama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI untuk menyelamatkan sistem perbankan, baik untuk keperluan mengatasi kesulitan likuiditas,

maupun dalam rangka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah.

2. Bank Indonesia harus terlibat untuk membantu penyelesaian krisis keuangan yang dihadapi oleh sektor korporasi selaku debitur bank.
3. Bank Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan darurat (LOLR).
4. Membentuk institusi yang menjamin deposan kecil (Lembaga Penjamin Simpanan) sebagai pengganti Blanket Guarantee yang tidak best practice. Bank Indonesia berperan aktif dalam persiapan pendirian LPS.
5. Membentuk wadah terkoordinasi terkait dengan stabilitas system keuangan baik secara internal dan eksternal.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bank Indonesia telah melaksanakan peranannya dalam menjaga stabilitas keuangan di Indonesia.
2. Bank Indonesia telah menerapkan strategi dalam menjaga stabilitas keuangan di Indonesia.
3. Pemerintah telah menerapkan strategi dalam menjaga stabilitas keuangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. 2008. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta : Pustaka Media
- Bank Indonesia. 2007. *Booklet Stabilitas Sistem Keuangan*. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
- Hax, Arnoldo & Manjluk, Nicholas. 2005. *The Strategy Process and Concept : A Pragmatic Approach*. NJ : Prentice Hall International
- Pearce II, John & Robinson, Richard. 2006. *Strategic Management Formulation Implementation and Control*. London : Irwin McGraw Hill
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Schinasi, Garry. 2006. *Safeguarding of Financial Stability : Theory and Practice*. Washington: International Monetary Fund

Siagian. 2007. Filsafat Administrasi. Jakarta :
Pustaka Cipta

Stuart, Verryn. 2007. Bank Politik. NJ: Prentice
Hall

Soekanto, Soerjono. 2009. Sosiologi Suatu
Pengantar. Edisi Baru. Jakarta : Rajawali
Press